

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK KONSTRUKSI
GEDUNG DENGAN DANA APBD MENURUT HUKUM KONTRAK
TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi di Program Studi
Magister Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas
Andalas*

Oleh :

AGIL RESFANI MARDHIYAH

NIM. 2220922014

PEMBIMBING I:

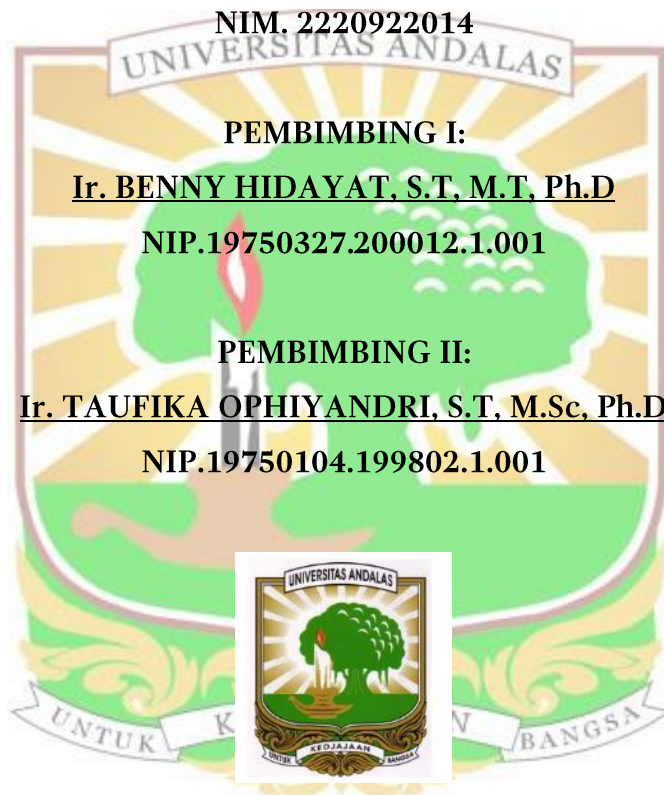
Ir. BENNY HIDAYAT, S.T, M.T, Ph.D

NIP.19750327.200012.1.001

PEMBIMBING II:

Ir. TAUFIKA OPHIYANDRI, S.T, M.Sc, Ph.D

NIP.19750104.199802.1.001



**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk menciptakan tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu (Soeharto, 1997). Menurut Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menjelaskan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Didalam proyek konstruksi terdapat surat atau dokumen yang berisikan perjanjian antara kontraktor dan owner. Dokumen perjanjian tersebut dapat juga disebut dengan kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan kontrak. Setelah pelaksanaan proyek konstruksi dilakukan atau dilaksanakan diharapkan pemilik proyek, konsultan pengawas dan kontraktor tahu akan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak. Pelaksanaan proyek konstruksi tentunya membutuhkan dana. Pada dasarnya secara potensial sumber pendanaan proyek yang dimiliki kontraktor diantaranya yaitu modal sendiri, sumber dari luar atau utang, dan sumber dari proyek atau pembayaran client owner (Widhiawati, 2014). Pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama antara kontraktor dan pemilik di dalam kontrak. Umumnya kontraktor menagih sejumlah dana secara periodik kepada pemilik dengan batas waktu pencairan dana yang telah ditetapkan. Menurut Diah (2019) Banyak kontraktor yang mengalami keterlambatan pembayaran yang tidak diketahui dan diprediksi sebelumnya. Hal ini menimbulkan masalah dan menghambat aktivitas pengerjaan proyek konstruksi sehingga berpengaruh pada waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan sebelumnya. Keterlambatan tersebut bisa dari pengguna jasa ataupun dari penyedia jasa. Permasalahan ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan proyek, khususnya pada tahap konstruksi, dimana terdapat kegiatan produksi, pengiriman, pekerjaan sipil, instalasi dan juga testing. Hal ini tentunya membuat kontraktor rugi, oleh karena itu kontraktor perlu mengetahui tatacara pelaksanaan pembayaran proyek konstruksi gedung menurut hukum dan apakah sudah sesuai dilapangan tatacara pembayarannya dengan yang di hukum agar kelak dapat mengambil langkah-langkah antisipasi keterlambatan pembayaran dimasa mendatang.

Kata Kunci : Keterlambatan Pembayaran, APBD, Metode Kualitatif

ABSTRACT

A construction project is a series of interrelated activities to create a specific goal (building/construction) within certain time, cost and quality limits (Soeharto, 1997). According to PUPR Regulation No. 14 of 2020 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction Services Through Providers, construction work is explained as all or part of the activities that include construction, operation, maintenance, demolition, and reconstruction of a building. In a construction project there is a letter or document containing an agreement between the contractor and the owner. The agreement document can also be referred to as a contract. The contract for funding goods/services is hereinafter referred to as a contract. After the construction project is carried out or implemented, it is hoped that the project owner, supervisory consultant and contractor will know their respective rights and obligations so that unwanted things do not happen to both parties. The implementation of a construction project certainly requires funds. Basically, the potential sources of project funding owned by the contractor include their own capital, external sources or debt, and sources from the project or client owner payments (Widhiawati, 2014). The implementation of payments is carried out in accordance with the procedures that have been mutually agreed upon between the contractor and the owner in the contract. Generally, contractors periodically charge the owner a certain amount of money with a predetermined disbursement deadline. According to Diah (2019), many contractors experience delays in payments that are not known and predicted in advance. This causes problems and hinders construction project work activities, thus affecting the previously determined project completion time. The delay can be from the service user or from the service provider. This problem will greatly affect project activities, especially at the construction stage, where there are production, delivery, civil work, installation and testing activities. This certainly makes the contractor lose, therefore the contractor needs to know the procedures for implementing construction project payments according to law and whether the payment procedures in the field are in accordance with the law so that in the future they can take anticipatory steps to delay payments in the future.

Keywords: Late Payment, APBD, Qualitative Method